



Mobil Dewan Bisa Ditarik

■ Rp 5,2 M untuk Tunjangan Transportasi

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pemkot Denpasar menganggarkan Rp 5.287.500.000 untuk dana transportasi para pimpinan dan anggota DPRD Denpasar selama satu tahun. Jika tunjangan transportasi ini diberikan, sebagai gantinya maka mobil dinas dewan bisa ditarik.

Jumlah dana Rp 5,2 miliar ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Denpasar tahun 2017 yang sebentar lagi bakal disahkan Pemkot Denpasar.

Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengaku apa yang dianggarkan

masih bersifat sementara, lantaran masih memerlukan verifikasi dari provinsi.

"Biarpun sudah disahkan, kan harus mendapat verifikasi dari provinsi itu, nanti bagaimana kebijakannya," kata Ngurah Gede, Kamis (27/7).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD telah diatur apabila Pemerintah Daerah sudah memfasilitasi mobil dinas kepada DPRD, maka tunjangan transportasi tidak bisa lagi diberikan secara bersamaan.

BERSAMBUNG ◀ HAL 7

Dana Komunikasi Bertambah

SELAIN tunjangan transportasi, dalam RAPBD Pemkot Denpasar juga telah dianggarkan tunjangan komunikasi intensif untuk para dewan sebesar Rp 5,2 miliar atau masing-masing dewan dapat Rp 9,8 juta per bulan.

Jumlah ini bertambah dibanding sebelum ada PP 18 tahun 2017 hanya Rp 3,4 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan Denpasar Putu Gede Dharma mengatakan, kenaikan ini murni karena adanya aturan pusat. Jika nanti masuk kategori tinggi, tunjangan komunikasi intensif naik 7 kali lipat dari uang representasi dewan. (win)

Mobil Dewan Bisa...

Itu sebabnya, seluruh kendaraan dinas yang selama ini difasilitasi Pemkot Denpasar untuk para dewan wajib dikembalikan apabila dewan sudah mendapatkan tunjangan transportasi.

Terkait hal tersebut, Ngurah Gede belum jelas menyampaikan apakah anggota DPRD Denpasar yang selama ini difasilitasi mobil dinas akan mengembalikan mobil dinas setelah menerima uang transportasi, atau bagaimana.

Namun, Ngurah Gede mengaku selama ini yang mendapatkan mobil dinas adalah para pimpinan DPRD Denpasar saja. Sedangkan, mobil di-

nas yang selama ini digunakan oleh para anggota DPRD Denpasar sifatnya pinjam pakai dengan biaya transportasi, dan perawatan secara pribadi.

"Sebelumnya mereka tanggung sendiri, kalau ada rusak, bahan bakar, semua ditanggung anggota. Kami tidak pernah minta itu," katanya ditemui usai sidang paripurna APBD Perubahan 2017, Kamis (27/7) di Gedung DPRD Denpasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan Kota Denpasar, Putu Gede Dharma Wiyasa mengatakan, meski sifatnya pinjam pakai, namun para legislator di Denpasar itu tetap wajib mengembalikan kendaraan yang ia pinjam selama ini

Edisi : Jumat 28 Juli 2017

Hal : 7



● DARI HALAMAN 8

apabila sudah menerima uang transportasi dari APBD. Jika tidak, maka kata dia akan berpotensi menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya nanti akan menjadi temuan kalau tidak dikembalikan. Makanya, harus dipilih salah satu. Sebelumnya kan mereka memang tidak menerima uang transportasi, dan mobil yang digunakan sifatnya pinjam pakai. Sekarang kalau suah menerima uang transportasi, ya harus dikembalikan semuanya," jelas Dharma Wiyasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar AAN Rai Iswara menjelaskan, apabila APBD Perubahan 2017 nanti-

nya disetujui Pemprov Bali, maka pihaknya bakal menggelar pembahasan lagi dengan pihak DPRD Denpasar untuk mencari solusi terbaik. "Sekarang belum bisa kami sampaikan akan ditarik atau tidak. Apabila nanti disetujui oleh provinsi, maka kami akan bahas lagi dengan dewan gimana baiknya," kata Rai Iswara.

Untuk diketahui, sejak 2015 hingga 2016 silam, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Denpasar dibelikan mobil baru jenis Kijang Innova. Kendaraan itulah yang nantinya terancam ditarik apabila masing-masing legislator tetap menerima uang tunjangan transportasi. (win)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : 7



Mobil Dewan Bisa Ditarik

■ Rp 5,2 M untuk Tunjangan Transportasi

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pemkot Denpasar menganggarkan Rp 5.287.500.000 untuk dana transportasi para pimpinan dan anggota DPRD Denpasar selama satu tahun. Jika tunjangan transportasi ini diberikan, sebagai gantinya maka mobil dinas dewan bisa ditarik.

Jumlah dana Rp 5,2 miliar ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Denpasar tahun 2017 yang sebentar lagi bakal disahkan Pemkot Denpasar.

Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengaku apa yang dianggarkan

masih bersifat sementara, lantaran masih memerlukan verifikasi dari provinsi.

"Biar pun sudah disahkan, kan harus mendapat verifikasi dari provinsi itu, nanti bagaimana kebijakannya," kata Ngurah Gede, Kamis (27/7).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD telah diatur apabila Pemerintah Daerah sudah memfasilitasi mobil dinas kepada DPRD, maka tunjangan transportasi tidak bisa lagi diberikan secara bersamaan.

BERSAMBUNG ◊ HAL 7

Dana Komunikasi Bertambah

SELAIN tunjangan transportasi, dalam RAPBD Pemkot Denpasar juga telah dianggarkan tunjangan komunikasi intensif untuk para dewan sebesar Rp 5,2 miliar atau masing-masing dewan dapat Rp 9,8 juta per bulan.

Jumlah ini bertambah dibanding sebelum ada PP.18 tahun 2017 hanya Rp 3,4 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan Denpasar Putu Gede Dharma mengatakan, kenaikan ini murni karena adanya aturan pusat. Jika nanti masuk kategori tinggi, tunjangan komunikasi intensif naik 7 kali lipat dari uang representasi dewan. (win)

Mobil Dewan Bisa...

Itu sebabnya, seluruh kendaraan dinas yang selama ini difasilitasi Pemkot Denpasar untuk para dewan wajib dikembalikan apabila dewan sudah mendapatkan tunjangan transportasi.

Terkait hal tersebut, Ngurah Gede belum jelas menyampaikan apakah anggota DPRD Denpasar yang selama ini difasilitasi mobil dinas akan mengembalikan mobil dinas setelah menerima uang transportasi, atau bagaimana.

Namun, Ngurah Gede mengaku selama ini yang mendapatkan mobil dinas adalah para pimpinan DPRD Denpasar saja. Sedangkan, mobil di-

nas yang selama ini digunakan oleh para anggota DPRD Denpasar sifatnya pinjam pakai dengan biaya transportasi, dan perawatan secara pribadi.

"Sebelumnya mereka tanggung sendiri, kalau ada rusak, bahan bakar, semua ditanggung anggota. Kami tidak pernah minta itu," katanya ditemui usai sidang paripurna APBD Perubahan 2017, Kamis (27/7) di Gedung DPRD Denpasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan Kota Denpasar, Putu Gede Dharma Wiyasa mengatakan, meski sifatnya pinjam pakai, namun para legislator di Denpasar itu tetap wajib mengembalikan kendaraan yang ia pinjam selama ini

Edisi : Jumah 28 Juli 2017

Hal : halan 7